

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *KOMPARTEMEN, Vol.XV No.1, Maret 2017* .
- Adyatma, E. (2015). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal”. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Vol 4 No 2, 190-205.
- Ferry, K. R. (2017). Serapan di Tiga Daerah di Jawa Tengah Rendah, Pembangunan Tidak Optimal. Retrieved from Tribunjogja.com :<
<http://jogja.tribunnews.com/2017/12/20/serapan-di-ketiga-daerah-di-jawa-tengah-rendah-pembangunan-tidak-optimal>
- Fozzard, A. (2001). The basic budgeting problem : Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Overseas Development Institute. *Working paper 147*.
- Ghozali, I. (2016). *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heliyanto, F. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 3, Maret 2016 ISSN: 2460-0585* .
- Husein. 2016. “Sisa Anggaran Tinggi, Penyaluran DAU 18 Kabupaten di Jateng Ditunda”. Melalui <beritajateng.net>[26/02/19]
- Indriantoro, & Supomo. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPF.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics Volumes 3, Issues 4, October* , 305-360.
- Keefar, P., & Khemani, S. (2003). *The Political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004 : Making service Work for Poor People*. The World Bank. .
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Mentayani, I., & Rusmanto. (2013). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan". *Jurnal Infestasi*. 9 No.2. 91- 102.
- Nuarisa, S., A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *ISSN 2252-5* .
- Nurmalasari. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, SiLPA terhadap Belanja Modal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)* Vol.3 No.1.
- Nuzana, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 10, Oktober 2016 ISSN: 2460-0585* .
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Permatasari, I. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 1, Januari 2016 ISSN: 2460-0585* .
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Setiawan, D. (2015). Pemkab Semarang Diminta Pacu Alokasi Anggaran Belanja Modal 2016. Retrieved from Tribun Jateng: &1t;http://jateng.tribunnews.com/2015/12/25/pemkab-semarang-diminta-pacu-alokasi-anggaran-belanja-modal-2016>
- Singarimbun, M., & Efendi. (2008). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta:LP3ES.
- Siregar, B. (2001). *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Smith, & Bertozzi. (1998). Principal Agent: An Explanatory model of public budgetting. *Journal of Public Budgeting Accounting and Financial Management (fall)*, 325-353 .

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tambunan, T. (2006). Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah. www.kardin-indonesia.or.id.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
- Von H., J. (2003). *Budgeting institutions and public spending, in Shah, Anwar(ed). Hanbook on Public Sector Performane Reviews*. Volume 1: Ensuring Accountability When There Is No Bottom Line. Washington, D.C.: The World Bank.
- Wandira, A., G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *ISSN 2252-6765* .
- Yani, A. (2008.). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.